



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 519/DJMT/PW1.1.1/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) daftar
Hal : Pelaporan LHKPN yang Perlu
Perbaikan di Lingkungan Badan
Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara

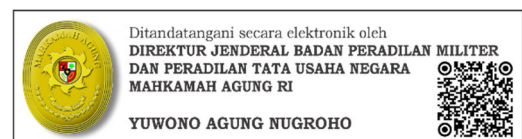
Jakarta, 14 Mei 2025

Yth. Para Ketua dan Kepala Pengadilan
(Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1539/BP/PW1.1.1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaporan LHKPN yang Perlu Perbaikan di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara agar memerintahkan kepada wajib lapor **yang berdasarkan hasil verifikasi oleh KPK dinyatakan status pelaporannya “Perlu Perbaikan”** (daftar nama terlampir) untuk segera melakukan perbaikan pelaporan LHKPN sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang menyebutkan bahwa penyampaian pemberitahuan perbaikan disampaikan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada penyelenggara negara dan penyelenggara negara wajib memperbaiki dan menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-lhkpn paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.

Jika wajib lapor sebagaimana terlampir telah melakukan perbaikan (termasuk wajib lapor yang telah pensiun) agar diinformasikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat elektronik yang dikirimkan pada email informasi.bawas@mahkamahagung.go.id. dan tembusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun melalui tautan: https://s.djmt.id/dokumen_wajib_lapor_LHKPN paling lambat tanggal **23 Mei 2025** dengan melampirkan bukti atau data dukung.

Demikian agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

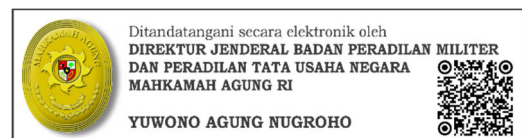


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
Nomor : 519/DJMT/PW1.1.1/V/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

DAFTAR KETUA DAN KEPALA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pengadilan Militer Tinggi I Medan
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
5. Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh
6. Pengadilan Militer I - 02 Medan
7. Pengadilan Militer I - 05 Pontianak
8. Pengadilan Militer II - 09 Bandung
9. Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta
10. Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
11. Pengadilan Militer III - 16 Makassar
12. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
13. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
14. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
15. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
16. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
17. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
18. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo



Lampiran II
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
Nomor : 519/DJMT/PW1.1.1/V/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

DAFTAR WAJIB LAPOR PELAPORAN LHKPN YANG PERLU PERBAIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Data per 2 Mei 2025

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja
1.	Ismail Usman, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
2.	Kapten Siswadi, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3.	Ira Gustini Br Ginting, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
4.	Khairunnas, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5.	Baherman, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
6.	R Indra Saputra, S.H., M.H.	Sekretaris	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
7.	Romatua Lasma Sembiring, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
8.	Novica Dewi Sampelan, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
9.	Hasan Basri	Panitera Pengganti	Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh
10.	Mayor Indra Gunawan, S.H., M.H.	Hakim Militer	Pengadilan Militer I - 02 Medan
11.	Letda Oktoriadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Militer I - 05 Pontianak
12.	Peltu Agung Sulistianto, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Militer II - 09 Bandung
13.	Mardopo, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta
14.	Kapten Kholip, S.H.	Panitera Tingkat Pertama	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
15.	Letkol Jasdar, S.H., M.H.	Hakim Militer	Pengadilan Militer III - 16 Makassar
16.	Muhammad Yunus Tazryan, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
17.	Zulkifli Roni, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
18.	Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.	Ketua Pengadilan	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
19.	Andi Adzan Mirzan, S.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja
20.	Jasman, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
21.	Rizma Meyditia, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
22.	Diah Juniar Safitri, S.H., M.Kn.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
23.	Misbah, SH	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
24.	Saltie Londong, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
25.	Burhan, S.H., M.H.	Panitera Tingkat Pertama	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
26.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
27.	Andreas Ases, S.H., M.H.	Sekretaris	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
28.	Syamsul Bakhry, S.H., M.H.	Sekretaris	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

YUWONO AGUNG NUGROHO



